



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor1, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 06/01/2024
 Reviewed : 09/01/2024
 Accepted : 17/01/2024
 Published : 18/01/2024

Claudia Rahim¹
 Burhan Niode²
 Agustinus B. Pati³
 Daud M. Liando⁴
 Michael Mamentu⁵

NETRALITAS MEDIA MASSA BERBASIS ONLINE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MANADO TAHUN 2020

Abstrak

Media massa memiliki peran penting dalam pesta demokrasi di Indonesia. Melalui informasi yang disebarluaskan, media massa bisa memengaruhi masyarakat untuk pro aktif dalam mendukung terciptanya sistem demokrasi melalui pemilihan umum yang sesuai dengan amanat undang-undang yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kehadiran media massa berbasis online memudahkan masyarakat mengakses informasi. Apalagi, pada gelaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020 dilakukan pada kondisi bencana nonalam Covid-19. Sehingga, penyelenggara pemilu membatasi kampanye tatap muka dan memberi kesempatan pada setiap pasangan calon untuk melakukan kampanye dengan memanfaatkan media online maupun media sosial. Di tengah era yang menuntut informasi serba cepat, media online lokal di Kota Manado pun memanfaatkan momen ini untuk gencar mempublikasikan gelaran pesta demokrasi. Namun, meski dituntut harus cepat menyajikan informasi, media massa wajib mengedepankan profesionalisme dengan bersikap netral penyajian berita yakni memenuhi unsur keberimbangan, ketidakberpihakan, keadilan atau kejujuran, dan objektivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media online lokal yakni Sulut Online dan Berita Manado menjaga netralitas pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analisis isi untuk mengetahui apakah dua media online tersebut bersikap netral pada selang waktu Oktober hingga November 2020, dimana pada bulan tersebut merupakan masa kampanye yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum. Dari hasil yang didapati peneliti, ditemukan bahwa kedua media tersebut tidak bersikap netral pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020. Hal itu ditunjukkan melalui porsi berita yang diberikan hingga judul dan isi berita dimuat oleh kedua media tersebut. Peneliti juga menemukan adanya dua faktor yang memengaruhi ketidaknetralan media, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni pengaruh kekuasaan dari pemilik hingga pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Sementara faktor eksternal yakni tekanan dan intimidasi pengiklan atau klien bisnis media tersebut. Melihat fakta ini, diharapkan ada langkah kebijakan dari Dewan Pers, eksekutif dan legislatif untuk mengatur kembali tata kelola media massa di Indonesia agar demokrasi bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku dan diakui dunia internasional.

Kata Kunci: Media Neutrality, Online Mass Media, Pilkada Manado

Abstract

The mass media has an important role in the democratic party in Indonesia. Through the information disseminated, the mass media can influence the public to be pro-active in supporting the creation of a democratic system through elections that are in accordance with the mandate of the law, namely direct, general, free, secret, honest and fair. The presence of online-based mass media makes it easier for people to access information. Moreover, the election for mayor and deputy mayor of Manado in 2020 was held in the conditions of the Covid-19 non-natural disaster. Thus, election organizers limit face-to-face campaigns and provide opportunities for each candidate pair to conduct campaigns by utilizing online media and social media. In the midst of an era that demands fast-paced information, local online media in Manado City also took

^{1,2,3,4,5} Universitas Sam Ratulangi
 email: burhanniode@unsrat.ac.id

advantage of this moment to aggressively publicize the democratic party event. However, despite being required to present information quickly, mass media must prioritize professionalism by being neutral in presenting news, which fulfills the elements of balance, impartiality, fairness or honesty, and objectivity. The purpose of this research is to find out whether local online media, namely Sulut Online and Berita Manado, maintain neutrality in the 2020 Manado mayor and vice mayor elections. In this study, researchers used the content analysis research method to find out whether the two online media were neutral in the interval from October to November 2020, which in that month was the campaign period set by the general election organizers. From the results obtained by researchers, it was found that the two media were not neutral in the 2020 Manado mayor and deputy mayor elections. This is shown through the portion of news given to the title and content of the news published by the two media. Researchers also found two factors that influence media neutrality, namely internal and external factors. Internal factors are the influence of power from the owner to fulfill the company's operational needs. While external factors are pressure and intimidation of advertisers or business clients of the media. Seeing this fact, it is hoped that there will be policy steps from the Press Council, executive and legislative to re-regulate mass media governance in Indonesia so that democracy can run according to applicable rules and be recognized internationally.

Keywords: Media Neutrality, Online Mass Media, Manado Elections

PENDAHULUAN

Sebagai pilar keempat demokrasi dan alat kontrol sosial, media massa memiliki peran penting dalam pesta demokrasi di Indonesia. Melalui informasi yang disebarluaskan, media massa bisa memengaruhi masyarakat untuk pro aktif dalam mendukung terciptanya sistem demokrasi yang sesuai dengan amanat undang-undang yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Di era banjir informasi ini, media massa tetap menjadi referensi masyarakat untuk mendapatkan informasi, terlebih pada momen pemilihan umum (Pemilu), meski masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi pemilu di laman media sosial atau website penyelenggara pemilu. Karena itu, penting bagi media massa menyajikan pemberitaan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan menjunjung tinggi netralitas. Melalui informasi yang disebarluaskan, media massa bisa memberi pendidikan berdemokrasi dengan cara yang benar kepada masyarakat umum. Secara khusus, lewat pemberitaan yang disajikan, para pemilih bisa mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber.

Media massa yang netral adalah media yang memberi porsi berimbang atau tidak berat sebelah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media massa wajib memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dari berbagai sumber berita sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas, demokratis dan berwawasan luas. Netralitas media massa tentunya juga dapat meminimalisasi terjadinya konflik di tengah masyarakat karena pemberitaan yang simpang siur dan berat sebelah. Sebagai mata dan telinga masyarakat, media massa tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apa pun selain kepentingan rakyat. Media massa perlu berusaha melindungi dan memperluas aspek otonominya secara relatif terhadap sumber utama kekuatan sistem politik dan sistem ekonomi dengan membangun sikap yang objektif, netral, terbuka serta seimbang. Tugas mulia media massa memang cukup berat di tengah tantangan zaman yang semakin kompetitif dan sulit ini. Apalagi dengan pertumbuhan media massa secara kuantitas cukup signifikan. bahkan disebut Dewan Pers, Indonesia menjadi negara dengan media terbanyak di dunia. Dikutip dari portal berita Media Indonesia di <https://mediaindonesia.com>, Dewan Pers menyebut bahwa data hingga 2018, jumlah media massa di Indonesia diperkirakan mencapai 47.000. Di antara jumlah tersebut, ada 43.300 media online, sekitar 2.000-3.000 media cetak, sisanya radio dan stasiun televisi. Pertumbuhan pesat tersebut bukan hal yang salah, karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pada Pasal 9 Ayat 1 menyebut bahwa setiap warga negara Indonesia dan warga negara berhak mendirikan perusahaan pers. Hal ini untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Pertumbuhan media massa adalah hal baik, sehingga masyarakat bisa memiliki banyak informasi dari sudut pandang yang berbeda. Media massa memiliki peranan penting dalam

mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka, sehingga hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara yang bisa diawasi publik. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Namun, dari segi bisnis, pertumbuhan media massa tentu kurang menguntungkan. Perusahaan pers harus kerja ekstra keras untuk memenuhi dan mencukupi biaya operasional perusahaan. Tak heran, melihat kenyataan yang terjadi, pada era ini, sebuah berita tidak selalu menampilkan sisi kebenaran saja. Sebuah berita dapat menjadi alat konstruksi yang realitas ditambah lagi dengan adanya ideologi dan kepentingan dari media itu sendiri. Di era yang semakin kompetitif dan persaingan bisnis perusahaan pers, ruang redaksi berpotensi disusupi kepentingan dan bisnis. Apalagi pada tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi, di mana media massa menjadi alat untuk promosi visi misi dan pencitraan partai politik maupun kandidat. Dengan kerja sama yang terjalin antara politikus dan media massa, ketidaknetralan baik dalam isi berita maupun porsi pemberitaan, berpotensi terjadi. Bila media massa disusupi kepentingan bisnis, masyarakatlah yang menjadi korban karena seolah didikte dengan pemberitaan yang lebih condong kepada satu kelompok saja.

Demokrasi yang berkualitas baik haruslah didukung oleh adanya pers yang bertanggung jawab dan profesional serta tidak memihak pada siapa pun. Seorang wartawan pun harus bisa menjunjung tinggi profesi jurnalistiknya yang selalu menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat. Karena dalam keadaan apa pun, seorang wartawan dituntut untuk bisa memberikan informasi yang benar dan nyata. Kebebasan pers yang dialami bangsa Indonesia pada 20 tahun terakhir ini diperoleh dari perjuangan yang panjang. Maka dari itu, media seharusnya semakin bermutu dalam menyajikan informasi-informasi kepada publik, bukan sebaliknya.

Keputusan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelola perusahaan pers, tentu memiliki tujuan agar fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, bisa berjalan. Namun, media massa diperhadapkan pada posisi dilematis yang sulit ditepis. Semangat juang pemberitaan bisa terganggu dengan kepentingan mengejar pendapatan perusahaan, sehingga bisa mempengaruhi konten yang disebar. McQuail (2000) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi konten media massa menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi gerak organisasi media yang pada akhirnya turut berdampak pada isi yang disajikan media. Faktor internal terdiri tiga hal yakni manajemen, profesional media (Sumber daya manusia) dan pendukung teknik/teknologi (alat). Faktor eksternal berupa tekanan ekonomi dan tekanan sosial politik. Tekanan ekonomi berupa kompetitor/pesaing, agen berita/informasi, pengiklan/sponsor, pemilik dan serikat pekerja. Sedangkan tekanan sosial politik seperti kontrol di bidang politik/hukum, kelompok penekan, dan institusi sosial lain.

Lantas bagaimana faktor eksternal utamanya tekanan bisnis dan ekonomi memengaruhi kualitas isi media? Konten media akan mencerminkan tingkat ketergantungan media terhadap kepentingan pengiklan dan bisnis (McQuail 2000). Kondisi ini sangat erat kaitannya pula dengan keputusan pemilik modal. Konten media selalu mencerminkan kepentingan dari mereka yang membiayainya. Media komersial menjadi sangat rentan terhadap persoalan ini sebab media komersial terkadang memang harus membuat keputusan untuk dapat terus bertahan, meski itu dapat secara langsung memengaruhi konten. Namun sebagaimana diungkapkan McQuail di atas, isi media sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal media sebagai organisasi. Tanggung jawab sebagaimana diamanahkan undang-undang maupun berbagai teori normatif tentang jurnalistik tampaknya bukan hal ringan untuk dijalankan. Terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi jalannya tanggung jawab itu, terutama berkenaan dengan keberlangsungan industri media itu sendiri.

Apa yang telah dipaparkan di atas dari McQuail, juga sama dengan apa digambarkan oleh Shoemaker & Reese (1996). Hal-hal yang dapat memengaruhi isi media bekerja di lima tataran (level) yakni level individu, rutinitas media (media routine), level organisasi, level luar media (extramedia) dan level ideologi. Level individu yakni berada pada pekerja media berupa karakteristik, latar belakang, pengalaman, sikap, kepercayaan, peranan, etika, nilai dan kekuasaan

di dalam media. Faktor-faktor yang ada dalam level individu (intrinsik) ini dikatakan tidak memengaruhi secara langsung terhadap konten media namun melalui cara memandang terhadap suatu hal yang pada akhirnya dapat memengaruhi bagaimana konten media dibentuk. Level media routine terdiri atas sumber (pemasok), organisasi media, dan penonton (konsumen), extramedia berupa sumber informasi (kelompok kepentingan, public relations, organisasi berita lainnya, sumber pendapatan (pemasang iklan, penonton), lembaga lain (bisnis, pemerintahan, agama, dsb), lingkungan ekonomi, serta teknologi (Shoemaker & Reese 1996).

Bagaimana idiologi dianut media jelas akan memberikan warna pada konten. Praktik-praktik yang berlangsung memperlihatkan kecenderungan terjadinya penetrasi oleh pihak-pihak yang memiliki media. Pemilik memanfaatkan waktu dan ruang dari media yang dimilikinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk mengekspresikan kepentingan politik pada masa pemilihan umum. Bukan hanya dari sisi perusahaan, wartawan dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya pun terganggu independensinya karena tingkat kesejahteraan yang kurang dibandingkan profesi lain dengan tugasnya sama yakni membela hak rakyat, memperjuangkan demokrasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas wartawan melindungi ekspresi gagasan publik yang bebas dan terbuka malah terbalik. Wartawan melindungi para pejabat dari kesalahan dan penyalahgunaan kebijakan. Memenuhi kebutuhan hidup akhirnya mengalahkan semangat juang demokrasi.

Pengaruh eksternal yang mesti menjadi perhatian yakni intervensi dari para pemangku kekuasaan di pemerintahan, termasuk partai yang berkuasa. Hal ini berpotensi terjadi lantaran ketidakdewasaan dan ketidakmatangan para politikus atau kandidat dalam partai. Partai politik (Purpol), kurang memikirkan pentingnya perekrutan kader dengan cara profesional bisa memengaruhi posisi media. Orang-orang yang duduk pada posisi-posisi strategis berpotensi melakukan apa saja untuk mendulang suara, termasuk memanfaatkan media massa.

Secara aturan, pemerintah memberi kebebasan kepada pers untuk melakukan tugasnya. Namun, praktik-praktik memanfaatkan media massa dengan cara yang salah tentu bukan hal baik. Apalagi, melihat kondisi di lapangan bahwa sumber iklan terbesar media massa ada pada anggaran pemerintah, hal ini sangat membuka peluang terjadinya intervensi pemberitaan. Media massa bisa tersandera dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sumbernya dari pemerintah. 80-90% pemasukan terbesar perusahaan pers bersumber dari APBD dan APBN. Bila media massa tidak mengikuti keinginan dan aturan main para pengambil kebijakan yang berkuasa, atau dengan kata lain tidak berada pada kubu penguasa pemegang kekuasaan pemerintahan, sulit mendapat anggaran. Praktik yang kerap terjadi menjelang dan dalam masa pemilu maupun pilkada, media massa seperti mempertaruhkan napasnya. Para politikus bisa memanfaatkan kekuasaan pemegang kendali anggaran dan menempatkan media massa bukan lagi sebagai mata dan telinga masyarakat, tapi humas partai dan calon atau figur yang diusung. Sehingga, benar atau tidaknya apa yang diberitakan bukan lagi hal yang penting dalam sebuah pemberitaan, tapi bagaimana strategi dan pencitraan partai dan calon bisa menghiasi beranda media.

Ancaman tidak akan mendapat kontrak kerja sama dan iming-iming bisnis lainnya juga sangat berpeluang terjadi. Selain pengaruh pemilik modal, independensi dan kinerja wartawan, ketidaknetralan media massa bisa dipengaruhi oleh para politikus dan partai berkuasa untuk mengintervensi media massa. Dengan kekuatan uang dan janji-janji bisnis, para politikus bisa menjadikan media massa alat mendulang suara. Intimidasi bisa masuk di ruang redaksi karena kekuatan uang, fasilitas dan tawaran kerja sama bisnis.

Konsekuensi mengambil tawaran dari pihak eksternal adalah media massa berubah menjadi media center, dan wartawan menjadi humas partai politik dan peserta pemilu. Praktik di lapangan, media massa yang sudah menyatakan diri mendukung salah satu calon atau partai politik, tidak lagi memuat informasi dari lawan politik. Bila pun ada pemberitaan, porsinya sedikit dan berita yang diangkat cenderung berita-berita menjatuhkan. Bersikap netral bagi media seolah menjadi langkah ekstrem dan bodoh. Efek lain yang muncul bila media massa tidak netral adalah kepada wartawan-wartawan baru. Praktik tidak netral dapat memengaruhi gaya kerja dan sikap para wartawan baru dalam menjalankan perannya sebagai jurnalis. Bila terus terjadi, mau jadi apa media massa kita?

Perusahaan pers yang dipercayakan kepada masyarakat sesuai amanat undang-undang, tentu memiliki tujuan jelas agar media massa bisa menjadi alat kontrol dalam setiap kebijakan pemerintah. Intervensi pemerintah dinilai hanya akan membawa pada berita yang tidak berimbang dan cenderung pejabat sentris. Tantangan yang lebih berat dihadapi di era ini adalah dengan perkembangan yang signifikan pada teknologi komunikasi. Kekuatan internet membuat banyak hal makin sulit dikontrol. Pergeseran pola hidup yang terjadi di masyarakat turut memberi pengaruh pada cara kerja media massa untuk memenuhi ruang-ruang informasi yang dibutuhkan masyarakat. Transformasi mau tidak mau harus dilakukan media massa untuk menjawab kebutuhan zaman. Kehadiran media online/daring memberi warna baru. Tak dapat disangkal, kehadiran media berbasis online memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat dan mudah.

Selain itu, masyarakat memiliki banyak referensi dengan sajian model pemberitaan yang berbeda dari setiap media massa. Pandemi Covid-19 yang mewabah dunia turut memberi dampak pada budaya masyarakat mengakses informasi. Dengan penerapan new normal atau tatanan baru yang mengharuskan masyarakat menaati protokol kesehatan dengan mengurangi kontak fisik, membuat kekuatan media online makin terlihat. Informasi bisa didapatkan masyarakat dari mana saja dan kapan saja selama terkoneksi dengan jaringan internet. Semangat penyebaran informasi sesuai amanat undang-undang, bisa dipenuhi dengan inovasi dan ide kreatif media massa memanfaatkan internet.

Seiring berkembangnya dunia pers, seketika koran, majalah, radio, dan televisi menjadi barang konvensional. Pascarevolusi digital, setiap orang merdeka membuat dan menyebarkan berita, seperti prosesor yang dari hari ke hari makin cepat. Karena itu, kemampuan jurnalistik dalam memahami dan menguasai proses kerja media di era digital menjadi sangat penting. Namun, dampak negatif dari banjir informasi tidak dapat dielak. Semakin nyaman, semakin tidak aman. Informasi kian terbuka dan cepat menyebar hanya dengan sekali klik. Internet memungkinkan informasi menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Zaman dulu, informasi begitu terbatas dan hanya bisa diakses kalangan tertentu. Banyak masyarakat gampang dibodohi karena ketidaktahuan akan informasi. Selain itu, masyarakat juga memiliki akses yang terbatas untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun, di masa kini, masyarakat tetap saja dibodohi dengan banjir informasi karena ketidaknetralan media massa. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu, di era informasi terbatas, masyarakat bahkan sulit untuk mengetahui dan mengenal kontestan dan seolah tidak bisa berbuat banyak bila menemukan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Saat ini, dunia seakan telanjang dalam akses tak terbatas yang bisa dijangkau oleh internet. Hal ini dibuktikan dengan penetrasi pengguna internet di Indonesia yang bertumbuh pesat dari 64,8% pada 2018 menjadi 73,7% di 2019. Data tersebut berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2019-2020 (Q2) yang bisa dilihat di <https://www.apjii.or.id>.

Hasil survei juga memperlihatkan peningkatan yang cukup besar penggunaan internet. Besarnya pengaruh internet juga bisa dilihat dari data durasi waktu yang dihabiskan masyarakat dengan internet. Di mana, 95% masyarakat pengguna internet menggunakan internet setiap hari. Setiap harinya, pengguna internet menghabiskan waktu lebih dari delapan jam di dunia maya. Pergeseran ini perlu untuk menjadi perhatian bersama, betapa besar pengaruh media dengan basis online kepada masyarakat. Dan betapa pentingnya media massa berbasis online menghayati peran pentingnya di era ini untuk memberi pendidikan demokrasi kepada masyarakat, bukan malah memanfaatkan kecepatan dan kemudahan yang ada untuk memprovokasi dan menodai profesi. Kenapa media massa perlu hati-hati? Karena tingkat pendidikan, mental dan budaya masyarakat kita berbeda-beda.

Setiap hari dengan durasi waktu yang tidak sedikit, masyarakat bisa mengakses apa saja dengan sekali klik. Karena itu, sangat penting informasi benar dan akurat untuk memenuhi ruang-ruang informasi masyarakat di era banjir informasi saat ini. Masalah politik dan sosial pun merupakan salah satu konten yang paling banyak dicari masyarakat ketika mengakses internet. Tak bisa dipungkiri, isu politik, apalagi di momen pemilu, menjadi bacaan dan konten yang paling diminati. Sejarah yang terjadi di bangsa ini pada Pemilu 2019 perlu menjadi pelajaran serius, dimana masyarakat terbagi dalam dua kelompok yang nyaris terjadi

perpecahan. Kekuatan atau power yang dimiliki internet memberi pengaruh yang cukup serius. Karena itu, pemilihan konten yang layak disebar dan filter kuat perlu menjadi komitmen media massa di era ini. Membangun citra baik dengan memanfaatkan pemberitaan memang bukan hal yang salah. Akan tetapi, media massa memiliki aturan-aturan main yakni dengan tidak mengistimewakan salah satu pihak atau golongan tertentu. Bila tidak ada lagi tempat bagi masyarakat untuk menaruh rasa percaya dan menjadi referensi untuk menambah khazanah berpikir, sulit untuk mencapai demokrasi sesungguhnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk penyelenggaraan pilkada.

Masih berdasarkan data APJII yang bisa diakses di <https://www.apjii.or.id>, penetrasi penggunaan internet di Sulawesi Utara (Sulut) pun menunjukkan peningkatan. Data menunjukkan, 78,6% dari 2,6 juta masyarakat Nyiur Melambai merupakan pengguna internet. Data juga menunjukkan bahwa peningkatan yang paling besar terjadi di ibu Kota Manado. Perkembangan yang cukup pesat, fasilitas dan akses yang lebih kuat menjadikan pengguna internet di ibu kota terus berkembang dan menyetuh berbagai lapisan masyarakat. Kota Manado sebagai ibu kota provinsi mencatatkan penggunaan internet yang cukup banyak. Apalagi, sebagai ibu kota yang mayoritas penduduk disibukkan dengan pekerjaan, masyarakat Manado lebih banyak mengakses informasi melalui media internet daripada berkunjung ke pos-pos media center dari para peserta pemilu. Hal ini menunjukkan betapa informasi yang disebarluaskan melalui media online ke media sosial begitu cepat diakses masyarakat. Kecepatan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh semua elemen yang terlibat dalam pemilu untuk menyebarkan informasi. Berdasarkan data, sebagai ibu kota provinsi, Kota Manado memang berkembang cukup pesat, bukan hanya fasilitasnya, namun juga sumber daya manusianya. Tak heran, penggunaan internet di Kota Manado sudah 90%.

Melihat data-data tersebut, tak heran pemilihan wali kota Manado cukup panas, bukan hanya di lapangan, namun juga di dunia maya. Apalagi dengan kondisi dunia yang masih dilanda Covid-19, pada Pilkada 2020, penyelenggara pemilu mengeluarkan aturan larangan berkerumun dan meminta peserta pemilu untuk memanfaatkan internet. Berbicara tentang pemilihan wali kota Manado, setelah melewati rentetan proses pendaftaran administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado pada 23 September 2020 mengumumkan bahwa empat pasangan calon yang telah mendaftar dinyatakan memenuhi syarat. Pilkada Kota Manado Tahun Pemilihan 2020, memang cukup menarik diikuti. Kursi bergengsi kepala daerah di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tentu menjadi rebutan. Karena itu, partai politik perlu hitung-hitungan matang melepas calon yang bisa merebut hati mayoritas 328.539 pemilih di Kota Manado. Persaingan sengit menduduki orang nomor satu di Kota Manado membuat partai politik perlu menyusun strategi jitu.

Begitupun yang terjadi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Manado pada tahun pemilihan 2020. Empat pasangan calon yang bertarung dan semuanya memiliki kekuatan massa, materi dan popularitas bersaing. Pasangan nomor urut 1, Andrei Angow dan Richard Sualang (AA-RS). Keduanya cukup dikenal publik. AA adalah pengusaha kaya dan dua kali menjabat Ketua DPRD Provinsi Sulut. Pada pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2019 lalu, AA sebagai calon dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Manado, berhasil merebut suara 33.115 suara. Angka yang cukup fantastis sehingga membawa AA sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulut. Maju sebagai calon Wakil Wali Kota Manado mendampingi AA adalah figur kader partai yang cukup ternama di Kota Manado yakni Richard Sualang atau RS. RS selama dua periode sebagai Anggota DPRD Manado. Dalam Pemilu Legislatif 2019, RS maju di tingkat provinsi dan berhasil memperoleh 16.749 suara, sehingga berada di posisi ketiga suara terbanyak.

Pasangan calon nomor urut dua Sonnya Selviana Kembuan dan Syarifudin Saafa (SSK-SS) yang diusung Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjadi pasangan yang cukup membuat gentar pasangan calon yang lain. SSK dikenal sebagai pengusaha dan aktif dalam kegiatan sosial. Koalisi tiga partai besar yakni Partai Golkar, Partai Hanura dan PKS 'mengawinkan' SSK dengan SS. SS sudah dikenal publik sebagai anggota DPRD Kota Manado yang duduk sejak 2009. Selanjutnya, pasangan nomor urut tiga adalah Mor Daminus Bastiaan dan Hanny Joost Pajouw (MOR-HJP). Pasangan calon nomor urut tiga ini cukup populer. MOR merupakan incumbent karena menjabat wakil wali Kota Manado

mendampingi Godbless Sofcar Vicky Lumentut (GSVL). MOR juga dikenal sebagai pengusaha dan pernah duduk di kursi DPRD Manado pada 2004 hingga 2014. Semendara HJP aktif dalam berbagai organisasi dan merupakan mantan legislator DPRD Sulut dan merupakan seorang pengusaha sukses. Selain itu, wajah HJP juga sudah beberapa kali menghiasi pesta demokrasi pemilihan wali kota Manado.

Sementara, pasangan nomor urut empat yakni Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Mangindaan (JPAR-AI) bukan lawan sembarangan. JPAR merupakan akademisi dengan jabatan terakhir sebagai rektor Universitas Negeri Manado (Unima). JPAR juga merupakan istri GSVL, Wali Kota Manado yang menjabat di masa Pilkada Serentak 2020. Sementara, Ai adalah mantan Wakil Wali Kota Manado yang pernah mendampingi GSVL pada periode 2010-2015. Ai juga cukup dikenal masyarakat sebagai anak dari Evert Ernest Mangindaan mantan Gubernur Sulut yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI dan beberapa kali menempati posisi menteri. Keempat calon yang maju pada pemilihan 2020 merupakan orang-orang unggul dan memiliki massa yang militan. Persaingan ketat yang terjadi cukup membuat panas suhu politik. Peran media massa juga cukup besar menaikkan suhu politik dalam pesta demokrasi tersebut. Betapa tidak, untuk merebut hati rakyat, para calon tanding-tandingan tampil di media massa. Apalagi, Pilkada 2020 merupakan sejarah baru karena dilakukan di masa pandemi Covid-19. Di mana, para calon dibatasi aturan yang ketat untuk melakukan kampanye sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan KPU13/2020. Sehingga, para calon begitu gencar mempromosikan diri melalui media massa, khususnya media siber/online. Berita-berita di media online begitu mudah disebar dalam berbagai platform media sosial. Hal ini akhirnya membuat terjadi baku tanding pemberitaan sehingga independensi dan netralitas media massa benar-benar diuji.

Peneliti tertarik untuk meneliti apakah media-media lokal di Sulawesi Utara bersikap netral pada masa Pilkada 2020. Karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait NETRALITAS MEDIA MASSA BERBASIS ONLINE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MANADO TAHUN 2020.

Dalam penelitian-penelitian lain tentang netralitas maupun peran media massa dalam pemberitaan, semisal jurnal Wartawan dan Netralitas Media yang ditulis Darajat Wibawa (UIN Sunan Gunung Jati Bandung). Jurnal tersebut menitikberatkan pada apakah wartawan memahami kata netralitas dan bagaimana mereka menerapkannya dalam aktivitas kerja setiap hari. Kemudian penelitian lain juga menunjukkan adanya kekuatan media massa dalam komunikasi politik. Penelitian dengan judul “Kekuatan Media Massa dalam Komunikasi Politik: Internet sebagai Sebuah Alternatif” yang ditulis oleh Yasir dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, menunjukkan ada kekuatan atau power yang dimiliki media dalam komunikasi politik. Bahkan di era ini komunikasi politik bertambah dengan hadirnya internet yang menjadi pilihan masyarakat dalam mengakses informasi.

Dalam proposal ini, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap dua media online lokal di Sulawesi Utara, apakah adanya sikap netral dalam hal porsi pemberitaan dan isi berita yang disajikan selama masa kampanye. Media massa lokal adalah media yang perusahaannya bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari media nasional. Kenapa media online lokal? Media online lokal memang sedang tumbuh subur di Sulut. Kemudahan membuat website dengan nilai investasi yang lebih kecil daripada koran cetak serta mudahnya pembaca mengakses berita melalui internet, membuat media online terus tumbuh. Hal ini yang perlu menjadi perhatian bersama agar ke depannya, media massa daerah bisa menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemberitaan. Selain itu, tugas dan tanggung jawab yang diemban bisa dilakukan semaksimal mungkin agar tercipta pesta demokrasi yang memiliki nilai integritas, murni, menghasilkan pemimpin dari rakyat dan berkualitas. Pelaksanaan pesta demokrasi yang ditunjang oleh sikap profesional media massa dalam penyajian berita akan menjadi catatan baik bagi pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Kota Manado di mata nasional maupun dunia internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah apakah media online lokal di Sulawesi Utara telah bersikap netral dalam menyajikan berita pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020.

METODE

Sifat Penelitian

Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak (Manifest) dan dilakukan secara objektif, valid reliabel dan dapat direplikasi (Eriyanto 2011:14). Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk media komunikasi seperti media cetak, media online dan media siar. Menurut Holsti, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan.

Fokus Penelitian

Netral berarti keseimbangan, ketepatan, dan keadilan (Radjak 2017). Nilai-nilai keadilan adalah adanya sikap tidak berpihak wartawan *neutral presentation* yang diwujudkan dengan cara melakukan perimbangan ataupun kesamaan porsi (*balance*) terhadap kedua belah pihak yang bertentangan, baik dalam sudut pandang maupun varian kejadiannya (Manurung 2007). Seperti yang telah dikemukakan Shafaat (2008:15), netralitas adalah keadaan tidak membantu salah satu pihak dalam ketidaksepakatan, kompetisi, dan sebagainya. Di mana, dalam Kode etik dan elemen jurnalisme juga menyatakan pentingnya media mengindahkan empat aspek yakni keberimbangan (*balance*), ketidakberpihakan (*impartiality*), keadilan atau kejujuran (*fairness*), dan objektivitas (*objectivity*).

Keberimbangan (*balance*)

Berimbang dalam menyajikan berita artinya memberikan kesempatan kepada semua pihak (*covering both sides*) untuk memberikan keterangan, penjelasan, klarifikasi, atau menyuarakan sudut pandangnya. Berita yang berimbang menampilkan semua sisi, semua pihak, dan semua pendapat, pro dan kontra.

Dalam kode etik jurnalistik menyebutkan:

Pasal I: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal III: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers, asas keberimbangan disebutkan dalam Verifikasi dan Keberimbangan Berita: Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Ketidakterpihakan (*impartiality*)

Ketidakterpihakan (*impartiality*) adalah media harus memberikan tempat yang sama pada pandangan yang berbeda. Media tidak mendikte atau mengarahkan, cukup mengungkap fakta apa adanya dan masyarakatlah yang memberi penilaian.

Keadilan (*Fairness*)

Fairness Doctrine (doktrin keadilan) dikeluarkan Komisi Komunikasi Federal (Federal Communications Commission/FCC) Amerika Serikat. Doktrin ini menegaskan media penyiaran radio dan televisi harus menyajikan beragam sudut pandang dalam sebuah isu kontroversial yang penting bagi masyarakat.

Objektivitas (*objectivity*)

Objektif secara bahasa artinya “mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi” (KBBI). Media harus memberitakan peristiwa apa adanya, menyajikan fakta atau data saja, tanpa memasukkan opini pribadi wartawan. Objektivitas pemberitaan dirumuskan dalam prinsip kesesuaian dengan kenyataan (*factuality*), yaitu benar atau akurat.

Peneliti ingin meneliti melalui metodologi analisis isi apakah ada unsur ketidaknetralan dari media online di Kota Manado, yakni tidak membantu salah satu pihak dan apakah media benar telah menjalankan prinsip keberimbangan, ketidakberpihakan, keadilan dan kejujuran serta objektivitas dalam menyebarluaskan pemberitaan pada November sampai Oktober 2020,

yang masuk masa kampanye Pilkada 2020.

Sumber Data Penelitian

Peneliti mengumpulkan data-data dari internet yakni di dalam portal berita milik media online lokal www.sulutonlie.com dan www.beritamanado.com dengan membuka index berita dan memanfaatkan mesin pencari dengan kata kunci “pilkada manado, pilwako manado” yang dipublikasikan pada rentang waktu Oktober sampai November 2020. Dari hasil pencarian data, peneliti akan menganalisis isi berita yang dipublikasikan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Manado yang merupakan satu dari 37 kota di Indonesia yang menggelar pemilihan wali kota. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan pencarian di internet pada portal berita milik www.sulutononline.com dan www.beritamanado.com yang dipublikasikan pada Oktober sampai November tahun 2020, yakni masih dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di era modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat dan instan. Informasi yang cepat menyebar menuntut ketelitian dan tanggung jawab moral media massa berbasis online untuk menyajikan informasi yang berimbang, tidak berpihak, jujur dan adil serta objektif. Media massa juga berperan besar dalam memengaruhi persepsi masyarakat tentang informasi yang disajikan. Pembentukan persepsi oleh media massa terjadi akibat masyarakat tidak memiliki alternatif lain sehingga mereka membentuk persepsinya berdasarkan informasi yang diterima dari media massa. Selain itu, media yang mempunyai kekuatan untuk membuat apa yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi benar. Karena itu, selayaknya fungsi pendidikan politik yang ideal dapat dilaksanakan oleh media massa.

Namun, kondisi ideal tersebut tidak dapat tercapai apabila media massa yang dihasilkan oleh perusahaan pers tersebut tidak netral atau independen dalam menjalankan fungsinya. Iklim pemberian dan penerimaan informasi seharusnya diciptakan dengan pemberian informasi yang berimbang dan sesuai dengan kaidah yang benar. Dalam pesta demokrasi, media mengambil peran penting dalam menyajikan informasi. Pemilihan umum dalam sebuah negara demokrasi merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara teoritis, pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, sehingga pelaksanaannya sebagai peristiwa kenegaraan yang penting. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi yang bertugas menyampaikan informasi secara resmi kepada publik atau masyarakat, sudah sepatutnya menjunjung tinggi profesionalitas dan mendukung terciptanya demokrasi yang sejati.

Dalam gelaran pesta demokrasi di Kota Manado Tahun 2020, peneliti melakukan penelitian kepada dua media online lokal, apakah dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, kedua media tersebut bersikap netral yakni memenuhi unsur keberimbangan (balance), ketidakberpihakan (impartiality), keadilan atau kejujuran (fairness), dan objektivitas (objectivity). Dua media yang dipilih untuk diteliti yakni media online Berita Manado dengan link portal www.beritamanado.com dan Sulut Online dengan link portal www.sulutononline.com.

Berita Manado

Media online www.beritamanado.com adalah media berita dan hiburan online yang berdiri sejak 10 April 2008 dan dikelola oleh PT Berita Manado Communication (PT. BMCOM). Berita Manado cukup dikenal di Sulawesi Utara. Meski media lokal, Berita Manado juga kerap mengangkat isu berita nasional dan internasional. Media ini juga cukup aktif menyebarkan berita di media sosial, baik melalui fanpage Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube. Berdasarkan informasi di laman Redaksi portal Berita Manado, media ini memiliki kantor dan studio di Kota Manado. Dari informasi yang tercantum, Berita Manado cukup terbuka dengan jajaran pimpinan dan sumber daya manusia (SDM) reporter dan staf. Dalam portal tersebut juga

memuat Pedoman Media Siber dan Kote Edit Jurnalistik serta kontak yang bisa dihubungi untuk hak jawab, informasi maupun pemasangan iklan.

Selain itu, Berita Manado juga mempublikasikan diri sebagai media yang bersertifikat Dewan Pers dan telah menerima berbagai penghargaan. Jurnalis Berita Manado juga diberi pelatihan jurnalistik oleh tokoh publik di Sulawesi Utara. Berita Manado juga selalu menyajikan berita-berita terkini, baik masalah politik, hukum, sosial dan budaya di Sulawesi Utara, nasional maupun internasional.

Sulut Online

Media online www.sulutonline.com juga merupakan salah satu media online lokal Sulut yang sudah cukup lama berkiprah, yakni sejak sejak Tahun 2010. Media online yang mengusung tagline “Torang pe Berita” ini dikelola di bawah naungan PT. Tiga Putra Kawana. Tim redaksi Sulut Online juga merupakan wartawan-wartawan senior di Sulawesi Utara. Berbeda dengan Berita Manado, Sulut Online cenderung lebih banyak memuat atau mempublikasikan berita-berita lokal di Sulawesi Utara. Media ini juga lebih banyak memuat berita-berita kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Dalam gelaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020, kedua media tersebut cukup aktif menyajikan pemberitaan terkait aktivitas para pasangan calon. Namun, baik Sulut Online maupun Berita Manado belum memberi porsi berita seimbang dan pemberitaan kedua media tersebut belum memenuhi unsur keberimbangan, ketidakberpihakan, keadilan dan objektivitas (Selengkapnya lihat lampiran). Berdasarkan data yang ditemukan peneliti, netralitas kedua media tersebut dipertanyakan. Masyarakat menjadi sulit dengan pembentukan opini melalui pemberitaan yang disajikan. Contohnya pemberitaan Sulut Online yang dipublikasikan pada 1 Oktober 2020 dengan judul “Lagi, MOR HJP Diterpa Isu Sesat, MiTo: Berpolitiklah yang Santun!!!”. Penggalan kalimat pada isi berita yakni, “Pasangan calon (paslon) yang diusung partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN), kini banyak diterpa isu miring, baik lawan main belakang dan ada yang mulai terang terangan. Saat ini terbersit kabar bahwa MOR HJP ditinggalkan pendukung, pun ditambah cerita terjadi penurunan baliho dll di sekretariat/posko MOR HJP di wilayah Manibang Malalayang 2. Jelas saja hal ini mengundang tanya? Apa benar lokasi itu adalah sekretariat ato posko MOR HJP?”, cenderung subjektif dan memihak. Isi berita yang menghakimi tanpa disertai bukti dan konfirmasi kepada pihak lain serta tidak ada pandangan pengamat atau penengah.

Selain itu, media tersebut tidak membuat berita lanjutan berisi pandangan-pandangan lain terkait isu yang disebar ke masyarakat tersebut. Bukan hal berlebihan bila timbul kekhawatiran terjadi monopoli dalam komunikasi. Media tidak hadir sebagai penengah dalam riak dan isu yang berhembus di masyarakat saat pesta demokrasi. Padahal, pemberitaan seperti itu bisa memicu memasnya suhu politik. Media massa seharusnya menolak campur tangan pihak-pihak tertentu dan mempertimbangkan kelayakan berita yang berdasar kepada kebenaran, keakuratan, aturan main dan keberimbangan. Kemudian pemberitaan Sulut Online pada 11 November 2020 dengan judul “3 Poin Penting dalam Closing Statement HJP Dinilai Paling Paripura”. Dalam pemberitaan tersebut, Lead atau teras berita yang merupakan bagian penting dalam berita justru memuat kalimat berisi, “Dibanding 3 Calon Wakil Walikota (Wawali) Manado yang lain, closing statement Calon Wawali Hanny Joost Pajouw (HJP) dalam Debat Publik Calon Wakil Walikota Manado yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Manado, Selasa (10/11/2020), dinilai banyak kalangan paling paripurna.” Pernyataan dalam berita tersebut begitu subjektif dan berlebihan karena hanya berdasarkan opini pribadi. Dalam berita tersebut tidak ada narasumber dan tidak ada pemberitaan tentang calon wakil wali kota yang lain dalam Debat Publik. Sulut Online tidak memberi porsi berimbang pada pasangan calon lain dalam hal publikasi pemberitaan. Ungkapan kalimat berita tersebut juga tidak memenuhi unsur ketidakberpihakan, karena penyajian berita mengistimewakan calon wakil wali kota Hanny Jost Pajow. Padahal, media secara profesional tidak diperkenankan beropini karena berada dalam posisi netral atau tidak memihak.

Pada prinsipnya, wartawan hanya menyajikan serangkaian fakta, data, dan pernyataan narasumber, sementara opini publik akan terbentuk dengan sendirinya sebagai dampak dari

penyajian informasi yang berlogika. Publikasi lainnya yang disebarakan Sulut Online pada 17 November 2023 dengan judul “Lebih Realistis, Relevan dan Terukur, Mor Bastiaan Tampil Elegan Dalam Debat Pilkada Manado”, menunjukkan sikap tidak netral. Kalimat dalam berita yang berisi ungkapan, “Calon Walikota Manado nomor urut 3, Mor Dominus Bastiaan (MOR) tampil elegan dalam Debat Kandidat Pilkada Kota Manado, Selasa (17/11/2020). Setiap pernyataan yang disampaikan terdengar santun dan menyejukan. Selama debat, MOR tak pernah menyerang calon lain secara personal.”, tidak menunjukkan media berada pada posisi netral. Ungkapan kalimat tidak menunjukkan profesionalitas sebagai pilar keempat demokrasi. Sulut Online secara terang-terangan memfavoritkan pasangan calon Mor Bastiaan dan Hanny Jost Pajow. Bahkan, berdasarkan data yang diperoleh, selang Oktober hingga November 2020, Sulut Online hanya mempublikasikan berita dari pasangan calon MOR-HJP, yakni sebanyak 66 berita. Sulut Online tidak memberi ruang pemberitaan kepada pasangan calon lain selang Oktober hingga November 2020 untuk menyampaikan visi misi mereka kepada masyarakat.

Sementara itu, Berita Manado dalam penyajian beritanya cenderung mendukung pada pasangan calon Julyeta Paulina Amelia Runtuwene – Harley Mangindaan. Berita yang dipublikasikan pada 11 Oktober 2020 dengan judul “Dua Figur Kuat Bersatu, Julyeta Runtuwene-Harley Mangindaan Yakin Menang Telak”, menunjukkan sikap tidak netral. Penggalan kalimat berisi, “Prof Dr Julyeta Paulina Amelia Runtuwene MS yang merupakan istri dari GS Vicky Lumentut, kini berpasangan dengan Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE MSM, artinya dua kubu besar tersebut telah bergabung.”, cenderung memihak. Apalagi Berita Manado tidak mengulas tentang potensi pasangan calon yang lain. Profil calon wali kota Prof. Julyeta terus diangkat sebagai istri wali kota yang masih menjabat. Hal ini tidak memenuhi unsur netralitas yang diwujudkan dengan sikap ketidakberpihakan Selanjutnya, berita dengan judul “Unggul di 4 Survei Nasional, Harley Mangindaan Target Menang Telak”, tidak berisi data akurat hasil survei. Padahal, baik judul maupun pada paragraf dua, berisi pernyataan: “Diketahui, ada 4 lembaga survey nasional memposisikan pasangan yang diusung Parpol NASDEM, PSI DAN PERINDO diposisi puncak dengan presentasi terpaut cukup jauh.”. Pemberitaan tersebut dipublikasikan Berita Manado pada 3 November 2020. Judul yang dipublikasikan tidak didukung oleh penyajian data, sehingga masyarakat membaca informasi yang tidak lengkap dalam sebuah berita. Selanjutnya, pada pemberitaan yang dipublikasikan 20 November 2020 dengan judul “Julyeta Runtuwene – Harley Mangindaan Kian Intens Tatap Muka dengan Masyarakat”, kalimat pada paragraf ketiga berisi: “Diketahui, menurut hasil penelusuran beberapa lembaga survei nasional menilai Harley Mangindaan merupakan sosok jujur, merakyat, sekaligus punya keterkenalan dan kesukaan masyarakat yang begitu tinggi.”. Sesuai kode etik jurnalistik, media wajib menyampaikan pemberitaan yang akurat sesuai dengan data dan fakta. Media seharusnya mengedukasi masyarakat dengan penjelasan dan pemahaman yang benar dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga masyarakat lebih cerdas dan bisa menilai sendiri figur mana yang baik untuk dipilih. Pernyataan dalam berita tersebut tidak diikuti oleh data hasil survei beserta indikatornya. Meski Berita Manado tidak seperti Sulut Online yang hanya memberitakan satu pasangan calon, namun berita pasangan calon Julyeta Paulina Amelia Runtuwene – Harley Mangindaan mendapat porsi lebih banyak yakni 52 berita, dibandingkan pasangan calon lain (Selengkapnya lihat lampiran).

Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, masa kampanye berlangsung mulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Setiap pasangan calon diberi waktu 71 hari untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat. Namun, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, bahkan Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan Nomor 13 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 melarang diselenggarakannya konser musik atau kegiatan yang mengundang banyak orang selama masa kampanye. Kampanye boleh dilakukan melalui media sosial dan media daring. Pasal 58 dalam peraturan tersebut menyatakan para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring. Jika penyelenggaraan kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial

dan media daring, maka diperbolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta menerapkan standar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kemudian, pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang tim kampanye melaksanakan kegiatan yang biasanya mengumpulkan massa dalam jumlah besar seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tahun partai politik. Dengan adanya aturan tersebut, para pasangan calon gencar melakukan kampanye melalui media online dan disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Hal ini membuat media daring/online gencar menyebarkan pemberitaan mengenai pasangan calon.

Berdasarkan data yang diperoleh selang Oktober sampai November 2020, dimana bulan tersebut merupakan masa kampanye yang diberikan penyelenggara pemilu, kedua media yang diteliti menunjukkan sikap tidak netral yakni belum memenuhi unsur keberimbangan (*balance*), ketidakberpihakan (*impartiality*), keadilan atau kejujuran (*fairness*), dan objektivitas (*objectivity*) dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Data yang ditemukan peneliti pada media online Berita Manado terdapat 85 berita tentang pasangan calon wali kota dan wali wali kota Manado. Berita mengenai pasangan calon Andrei Angouw - Richard Sualang sebanyak 20 berita, pasangan calon Selviana Kembuan - Syarifudin Saafa dua berita saja, Moor Dominus Bastiaan- Hanny Joost Pajow sebanyak 11 berita dan pasangan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene - Harley Mangindaan paling banyak dipublikasikan yakni sebanyak 52 berita. Media online Berita Manado memiliki kecenderungan berpihak pada pasangan calon Julyeta Paulina Amelia Runtuwene - Harley Mangindaan dengan memberi porsi 52 berita. Dalam isi berita, media online Berita Manado hanya mengangkat kegiatan dari satu calon dan tidak ada narasumber lain sebagai pembanding. Penggalan berita yang diterbitkan 11 Oktober 2020 yakni “Prof Dr Julyeta Paulina Amelia Runtuwene MS yang merupakan istri dari GS Vicky Lumentut, kini berpasangan dengan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE MSM, artinya dua kubu besar tersebut telah bergabung”, menjadi tidak netral karena media Berita Manado tidak membahas potensi dari pasangan calon lain dalam berita ataupun dalam link berita lainnya.

Berdasarkan data, media online Berita Manado kurang memberi porsi kepada pasangan calon lain untuk menyampaikan visi misi dan program mereka kepada masyarakat. Bahkan, pada isi yang ditulis, peneliti menemukan adanya ketidaknetralan media dalam pesta demokrasi tersebut. Berita-berita yang disebarluaskan tidak mengedukasi masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai narasumber. Dalam pemberitaan juga banyak yang hanya merupakan opini penulis belaka. Padahal, media adalah saluran komunikasi massa yang menjangkau sasaran yang sangat luas, apalagi dengan penyebaran melalui media online. Media yang merupakan pilar keempat demokrasi mesti menjadi teladan dalam berdemokrasi, karena media massa dapat bersuara manakala difasilitasi oleh sistem demokrasi. Sebagai mata dan telinga masyarakat, media massa harusnya memposisikan diri sebagai sumber informasi edukasi politik kepada masyarakat. Namun, dalam pemberitaan lainnya yang dipublikasikan Berita Manado pada 5 Oktober 2020, penggalan kalimat dalam teras berita (*Lead*), “Kualitas serta kapabilitas pasangan calon (Paslon) Wali Kota Prof Dr Julyeta Paulina Amelia Runtuwene MS dan Wakil Wali Kota Manado Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE MSM, tidak bisa diragukan lagi.”, kalimat tersebut cenderung beropini. Media tersebut menyebut kualitas serta kapabilitas pasangan calon Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan tidak diragukan dalam teras beritanya. Ungkapan tersebut tidak memenuhi unsur netralitas media dalam pesta demokrasi. Media menyampaikan opini pribadi dan tidak mengedukasi masyarakat untuk berdemokrasi dengan baik dan benar. Ketidakraguan pada kualitas dan kapabilitas pada pasangan calon harusnya disuarakan atau diungkapkan oleh seorang tokoh yang memiliki data dan fakta tentang pasangan calon tersebut dan didukung dengan indikator penilaian yang jelas. Kalimat berlebihan lainnya yang ditulis dalam pemberitaan tersebut yakni “Beranjak dari hal tersebut, tidak salah ketika paslon Julyeta Runtuwene – Harley Mangindaan dinilai lebih paham dengan kebutuhan masyarakat Kota Manado di masa kini dan masa datang.”. Penulis berita mempromosikan pasangan calon tersebut sebagai figur yang dinantikan dan dibutuhkan masyarakat Kota Manado. Kata “dinilai” tidak jelas penilaian dari siapa dan kapan. Dalam berita tersebut tidak ada narasumber dari pihak penilai.

Sebagai media massa, pemberitaan yang dipublikasikan kepada masyarakat mesti berisi ungkapan dan data yang berbobot sehingga dalam masa kampanye, media bisa membantu masyarakat mendapatkan informasi tentang pasangan-pasangan calon yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Pemberitaan lainnya yang dipublikasikan Berita Manado pada 26 November 2020 dengan judul “Program Rumah Murah Julyeta Runtuwene – Harley Mangindaan, Dibangun Bertahap dalam 5 Tahun, Sumber Dana APBD”, tidak netral. Berita Manado tidak memberi kesempatan kepada pasangan calon lain untuk mempublikasikan program kerja mereka atau visi dan misi jika terpilih. Berdasarkan data (Lihat lampiran), Berita Manado terus menggaungkan mengenai program Rumah Murah yang ditawarkan pasangan calon tersebut. Hal ini tidak memenuhi unsur keadilan serta secara terang-terangan ada keberpihakan. Tiga pasangan calon lain yang juga menawarkan program kerja, tidak mendapat kesempatan publikasi. Pemberitaan pasangan calon Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan mendapat keistimewaan dari Berita Manado, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mencari informasi tentang pasangan calon lain karena kurangnya pemberitaan dari media tersebut.

Hal yang menyolok juga diperlihatkan Sulut Online, Sepanjang Oktober-November, media tersebut hanya memuat berita tentang pasangan calon Moor Dominus Bastiaan- Hanny Joost Pajow. Sebanyak 66 berita yang disajikan, hanya memuat kegiatan harian pasangan calon tersebut dan tidak ada informasi atau pemberitaan tentang pasangan calon lain. Dari isi berita juga menunjukkan ketidaknetralan karena narasumber berita hanya dari satu pasangan calon saja. Berita yang disebarakan menggunakan kalimat-kalimat pujian kepada calon Moor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajow sebagai satu-satunya pasangan calon yang layak untuk memimpin Kota Manado. Sebagai media massa, Sulut Online seharusnya memberi juga kesempatan kepada pasangan calon lain untuk mempublikasikan program dan visi misi mereka. Sehingga masyarakat bisa menilai dan menentukan dengan baik sikap politiknya pada pemilihan kepala daerah. Dengan gaya pemberitaan seperti itu, Sulut Online tidak lagi menempatkan diri sebagai media massa, namun telah menjadi tim sukses pasangan calon Moor Dominus Bastiaan- Hanny Joost Pajow.

Dalam pemberitaan 16 Oktober 2020 ada penggalan kalimat “Ingat ibu-ibu, saya bersama calon Wakil Walikota Hanny Jost Pajouw (HJP) telah menggulirkan 14 program unggulan. Dimana dalam point pertama menyebutkan, Bantuan sosial dana tunai bagi lanjut usia (lansia).”. Sulut Online secara massif menyebarkan informasi tentang program pasangan calon Moor Dominus Bastiaan dan Hanny Joost Pajow. Dalam satu berita pun berisi lima foto dalam kegiatan. Sulut Online menunjukkan keberpihakan yang secara terang-terangan kepada pasangan calon tersebut. Media online lokal tersebut tidak memberi ruang dan kesempatan kepada pasangan calon lain untuk menyampaikan program kerja dan aktivitas kampanye mereka. Pemberitaan lainnya, yakni pada 29 Oktober 2020 dengan judul berita “MOR-HJP Siapkan Tempat Pemakaman Umum Gratis Bagi Warga Kurang Mampu” menunjukkan sikap tidak netral media. Sulut Online terus mempromosikan pasangan calon Moor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajow. Dalam isi berita tidak ada narasumber lain sebagai pembanding atau pengamat politik untuk berbicara dari sisi lain atau pandangan yang bisa menjadi referensi bagi pembaca. Pada paragraf pertama atau teras berita, berita tersebut berisi kalimat promosi terhadap pasangan calon tersebut, “Berbagai kemudahan akan diberikan Mor Dominus Bastiaan dan Hanny Joost Pajouw (MOR-HJP) ketika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Manado.”. Pada Alinea ketiga juga mengandung ungkapan kalimat berlebihan bagi media yang seharusnya bersikap adil dan tidak memihak. Kalimat berisi, “Paslon profesional muda dan berpengalaman ini juga akan menyiapkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) gratis untuk membantu warga kurang mampu di kota Manado.”. Ungkapan “Paslon profesional muda dan berpengalaman” menunjukkan sikap yang terang-terangan tidak netral dari penulis berita atau dari media yang mempublikasikan berita tersebut. Sulut Online bisa memuat berita tentang program dari pasangan calon nomor urut tiga tersebut, namun bukan berarti secara tidak profesional menggunakan kata dan kalimat yang tidak menunjukkan netralitas saat masa kampanye. Apalagi, Sulut Online tidak memuat satu pun informasi atau pemberitaan tentang pasangan calon lain. Masih pada berita yang sama, pada alinea keempat, berisi kalimat

“Menurut sosok yang rendah hati, jujur, peduli dan merakyat ini, selama ini warga mengeluh bahwa keluarga yang berduka masih dibebani biaya pemakaman di TPU.” Ungkapan Menurut sosok yang rendah hati, jujur, peduli dan merakyat ini, merupakan pendapat dari penulis karena bukan merupakan ucapan dari pihak lain atau narasumber berita. Dalam memuat sebuah berita yang merupakan konsumsi publik dan informasi tersebut bersumber dari media massa yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas, kalimat tersebut tidak tepat. Media massa seharusnya menulis penilaian yang disampaikan oleh narasumber yang jelas sehingga berita tersebut tidak terkesan memiliki muatan politik.

Ketidaknetralan Sulut Online dalam meramu berita pada perhelatan pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020, juga terlihat pada publikasi tanggal 12 November 2020 dengan judul “Mor Bastiaan dan Istri Jalan Kaki Keluar Masuk Lorong Sempit Temui Warga Kota Manado”. Pada teras berita ditulis, “Mor Dominus Bastiaan (MOR) benar-benar memiliki performance yang top.”. Lagi-lagi, Sulut Online menunjukkan keberpihakan melalui kalimat yang mempromosikan calon wali kota Mor Dominus Bastiaan. Hal ini tidak ditunjukkan kepada pasangan calon yang lain, sehingga secara terang-terangan, Sulut Online menunjukkan sikap tidak adil pada gelaran pemilihan kepala daerah di Kota Manado. Pemberitaan yang sarat kepentingan tersebut, kurang memberi Pendidikan politik dan demokrasi kepada khalayak. Keberpihakan Sulut Online kepada pasangan calon Moor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajow juga diperlihatkan melalui publikasi berita selang Oktober-November 2020. Pemberitaan yang dipublikasikan pada 18 November 2020 dengan judul “MOR-HJP Peduli Pedagang: Turunkan Sewa Lapak Lalu Tata Kelola Pasar”, mengulas tentang pernyataan Mor Dominus Bastiaan saat debat publik. Sulut Online tidak memuat satupun berita calon wali kota lain dalam debat publik. Pada alinea keempat dalam berita tersebut juga menyebut, “Dikatakan sosok rendah hati, jujur, peduli dan merakyat ini, pertama-tama yang dilakukan adalah memperhatikan kesejahteraan penjual.”. Kalimat tersebut tidak menunjukkan sikap netral dan berpotensi merusak citra media massa di tengah masyarakat. Sulut Online memberi ruang sebanyak-banyaknya pada pasangan calon Moor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajow untuk berkampanye. Selain itu, kata dan kalimat yang merupakan opini pribadi tidak layak untuk diberitakan sebagai konsumsi khalayak mengingat media massa memainkan peran penting dalam negara demokrasi. Media massa memiliki tanggung jawab dalam melakukan fungsi kontrol dan kritik sehingga jalannya pesta demokrasi sesuai dengan amanat undang-undang. Namun, dengan data dan fakta yang termuat dalam publikasi berita, media massa justru ambil bagian dalam praktik yang tidak mencerminkan netralitas dan pendidikan politik pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020.

Indonesia sebagai negara demokratis tentu memerlukan keterlibatan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi dalam mengontrol jalannya atau terselenggaranya pemilu. Media harus hadir untuk memberikan berita yang netral kepada masyarakat. Tegangnya situasi pemilihan umum, di mana setiap kandidat berpacu dan berupaya untuk mencuri perhatian masyarakat, media perlu hadir memberikan pendidikan politik serta menyampaikan informasi-informasi perkembangan politik dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan umum. Seharusnya, media membantu penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan jurdil). Media seharusnya menjadi pendorong terciptanya demokrasi bersih dan bermartabat. Berdasarkan data yang ada, media justru memposisikan diri sebagai tim sukses dari pasangan calon tertentu. Terjadi penyalahgunaan profesi sehingga hal ini akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada media massa. Media yang seharusnya netral justru ikut terlibat dalam politik praktis yang akan berdampak pada tidak tercapainya asas pemilu. Seperti yang diuraikan di atas, baik berdasarkan porsi berita dan konten yang disajikan, kedua media tersebut tidak menunjukkan netralitas sebagai pilar keempat demokrasi. Momen kampanye yang seharusnya diisi dengan pemberitaan berkualitas agar masyarakat bisa memberi penilaian akan figur para pasangan calon, justru tidak terpenuhi. Kedua media tersebut tidak memberi kesempatan yang sama kepada semua calon untuk mensosialisasikan program.

Dengan data dan fakta yang terjadi, peneliti menggali lebih dalam penyebab ketidaknetralan media dalam pesta demokrasi. Dalam sebuah produksi berita, ada faktor-faktor

tersembunyi namun terstruktur yaitu orang-orang dan organisasi yang memproduksi berita tersebut. Faktor internal dan eksternal yang memberi pengaruh terhadap sebuah konten yang dihasilkan oleh media massa. Shoemaker & Reese (1996) juga menyampaikan terkait pengaruh internal dan eksternal tersebut dan menyebut bahwa ada lima tataran (level) yakni level individu, rutinitas media (media routine), level organisasi, level luar media (extramedia) dan level ideologi. Level individu yakni karakteristik individu dari pekerja media seperti latar belakang dan pengalaman jurnalis. Hal ini memang tidak secara langsung memengaruhi konten, namun karakteristik tersebut memengaruhi sikap maupun perilaku personal serta profesionalisme yang bersangkutan. Hal inilah yang memengaruhi isi konten yang disebar. Lebih spesifik, hal ini berkaitan dengan keyakinan dan sikap profesionalisme yang merujuk pada kode etik media yang di dalamnya ada individu-individu yang menjalankannya. Peneliti menemukan adanya pengaruh sikap individu pada penyebaran konten yang tidak netral pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020. Level individu ini berkaitan dengan sikap profesionalisme di internal media, baik pemilik, tim manajerial hingga wartawan atau jurnalisnya.

Selanjutnya, level rutinitas media. Yang dimaksud dengan rutinitas media adalah kebiasaan mengemas berita. Hal ini dipengaruhi oleh sumber berita, tim redaksi dan khalayak. Khalayak seharusnya berpengaruh terhadap rutinitas media, karena informasi yang disebar media adalah untuk khalayak. Dalam rutinitas media unsur pentingnya adalah nilai berita atau news value. Hal yang mendukung adanya nilai berita yakni memenuhi unsur penting, besar, aktual, kedekatan, keunikan, humanis dan kontroversi. Nilai berita membuat rutinitas media dalam pengemasan konten yang disebar memahami mana yang pantas dan tidak pantas disebar. Peneliti tidak menemukan dua media tersebut mengaplikasikan nilai berita dalam rutinitas media, sehingga ditemukan adanya berita-berita yang tidak layak dikonsumsi khalayak yang seharusnya menjadi sentral dalam pemberitaan. Hal lain yang memengaruhi konten adalah level organisasi media. Level ini berkaitan dengan struktur manajemen organisasi, kebijakan dan tujuan media. Level ini sangat berpengaruh terhadap konten yang disajikan, karena kebijakan untuk memproduksi berita dipegang oleh editor dan editor akan tunduk kepada pemilik perusahaan. Jika pemilik memberi tekanan untuk pemberitaan tertentu, pekerja media secara individu dan rutinitas akan tunduk. Peneliti menemukan bahwa pengaruh kekuasaan di dalam media cukup memengaruhi arah berita dan konten yang dihasilkan. Kekuasaan yang dimaksud adalah pemilik atau owner, pemimpin umum dan pengaruh divisi lain di dalam perusahaan yakni Divisi Penjualan. Kepentingan bisnis atau faktor ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan menjadi hal mendasar. Media memerlukan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja di kantor maupun di lapangan. Perusahaan media juga memiliki biaya operasional bulanan seperti perusahaan atau bisnis usaha pada umumnya. Sehingga pihak-pihak yang memiliki kuasa atas perusahaan tersebut sangat berpengaruh terhadap arah berita dan konten yang disebarluaskan. Selain itu, kedekatan pemilik dan penguasa di internal media dengan salah satu calon yang maju dalam kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020, juga memengaruhi konten media.

Level selanjutnya adalah ekstramedia atau pengaruh dari luar organisasi media. Pengaruh ini berasal dari sumber berita, hubungan kerja sama, pemerintah dan pengiklan. Hal ini memberi pengaruh yang cukup besar kepada isi konten yang diproduksi oleh media massa. Dalam hal ini, media massa diibaratkan sebagai peniup trompet dan suara trompet itu dikomposisikan oleh orang yang membiayai peniup trompet. Secara substansial isi media secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh pengiklan atau klien bisnis. Hal itu akan terlihat dari isi berita yang dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki pola-pola yang sama dengan pola konsumsi target konsumen. Pemasang iklan yang datang dari pihak swasta, pemerintah dan bahkan calon yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah, menggunakan kekuatan modalnya untuk membiayai media agar konten tidak bertentangan dengan produk atau tujuan pemenangan calon. Hal ini ditemukan peneliti sebagai salah satu unsur yang meratalbelakangi penyebaran konten yang tidak netral dari media massa. Sumber dana media masih sangat tergantung kepada kerja sama dengan pemerintah. Sehingga siapa yang memiliki kekuatan dan pengaruh di pemerintahan kala itu, akan memanfaatkan kekuasaan untuk

menggunakan media massa sebagai alat politik. Dalam hal ini, masalah ekonomi memberi pengaruh besar pada konten yang disebarluaskan.

Kemudian level ideologi. Ideologi dipandang sebagai kerangka berpikir tertentu yang dipakai individu untuk melihat realitas dan bagaimana menghadapinya. Berbeda dengan level sebelumnya yang tampak konkret, level ideologi ini abstrak. Level ini berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsir realitas dalam media. Sehingga, Ketika media dikontrol pihak pemerintah, swasta dan pribadi, maka fungsi media akan bergeser. Media yang seharusnya memberikan pemberitaan yang netral yakni memenuhi unsur berimbang, ketidakberpihakan, adil dan jujur serta objektif justru menjadi corong propaganda kelompok-kelompok tersebut. Peneliti menemukan bahwa kedua media tersebut disusupi oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik pada kontestasi pesta demokrasi. Sehingga, Ketika ada campur tangan lain dalam pemberitaan yang diproduksi oleh media massa, maka fungsinya bergeser. Apalagi, sumber pendapatan media massa paling banyak adalah dari pemerintah. Sehingga pemerintah yang berkuasa khususnya yang berada pada devisi kerja sama, memiliki pengaruh cukup besar pada konten yang disebarluaskan.

Resiko yang ditimbulkan akibat ketidaknetralan media adalah kepercayaan masyarakat akan kualitas media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Dengan cara-cara tidak profesional yang dilakukan oleh pihak-pihak pendukung demokrasi, apakah tujuan dan hasil pemilihan umum bisa disebut demokratis? Resiko lainnya yang muncul adalah fenomena yang tidak menciptakan solusi dan kebijakan pengendalian serta antisipatif yang akan memperburuk posisi dan peran media massa. Dalam hal ini, fungsi pengawasan terhadap media masih belum berjalan. Perlu adanya aturan yang konkret agar media benar-benar bisa menjalankan perannya dengan baik di tengah masyarakat.

Pergeseran fungsi yang terjadi bisa mesti diatasi agar media tidak menjadi alat politik demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, pemilik memanfaatkan waktu dan ruang dari media yang dimilikinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk mengekspresikan kepentingan politik pada masa pemilihan umum. Bukan hanya dari sisi perusahaan, wartawan dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya pun terganggu independensinya karena tingkat kesejahteraan yang kurang dibandingkan profesi lain dengan tugasnya sama yakni membela hak rakyat, memperjuangkan demokrasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas wartawan melindungi ekspresi gagasan publik yang bebas dan terbuka malah terbalik. Wartawan melindungi para pejabat dari kesalahan dan penyalahgunaan kebijakan. Memenuhi kebutuhan hidup akhirnya mengalahkan semangat juang demokrasi. Pengaruh eksternal yang mesti menjadi perhatian yakni intervensi dari para pemangku kekuasaan di pemerintahan, termasuk partai politik yang berkuasa. Hal ini terjadi lantaran ketidakdewasaan dan ketidakmatangan para politikus atau kandidat dalam partai. Partai politik (Parpol), kurang memikirkan pentingnya perekrutan kader dengan cara profesional bisa memengaruhi posisi media. Orang-orang yang duduk pada posisi-posisi strategis berpotensi melakukan apa saja untuk mendulang suara, termasuk memanfaatkan media massa. Informasi yang didapat peneliti, bahwa kerja sama media dengan pemerintah justru malah menghimpit ruang gerak media untuk mengkritisi kebijakan, program bahkan kinerja pemerintah Kota Manado. Media dilarang mencemarkan nama baik pemerintah yang diatur sebagai salah satu syarat dokumen kerja sama.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh, dua media online lokal yakni Sulut Online dan Berita Manado tidak memenuhi unsur keberimbangan (balance), ketidakberpihakan (impartiality), keadilan atau kejujuran (fairness), dan objektivitas (objectivity) dalam penyajian berita. Ketidaknetralan media massa ini dipengaruhi oleh faktor internal media yang belum menjunjung tinggi profesionalitas dan menempatkan kode etik jurnalistik sebagai dasar dari rutinitas media dalam menyajikan informasi kepada khalayak. Ruang redaksi yang harusnya tidak disusupi kepentingan lain selain kepentingan rakyat dan pembangunan negara, justru melegalkan praktik yang bertentangan dengan demokrasi karena terdesak masalah ekonomi yakni pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Selain faktor internal, fenomena di balik ketidaknetralan media massa juga dipengaruhi pihak eksternal di luar media. Pihak eksternal

tersebut yakni pemasang iklan yang di dalamnya ada individu, pemerintah dan swasta. Tekanan dari pihak eksternal yang dibungkus oleh perjanjian kerja sama bisnis, membuat media terjebak pada monopoli pemberitaan yang dikehendaki oleh pemasang iklan. Tekanan faktor internal dan eksternal tersebut membuat konten-konten yang disebarluaskan kepada masyarakat tidak lagi netral sesuai dengan amanat undang-undang dan kode etik jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara J wacana
- Aguswandi, A., Cangara, H., & Sultan, M. I. (2019). Konstruksi Pemberitaan Partai Perindo di iNews TV. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.25008/jpi.v1i2.19>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2019-2020 (Q2). <https://www.apjii.or.id>.
- Creswell, John W, 1998, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*, Sage Publication, California.
- Hasan, K. (2014). *Kajian Netralitas Industri Media dalam Pemilu 2014*.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: an introduction ot its Methodology*, London: SAGE Publucations, 1991.
- Littlejohn, Foss. (2015). *Theories of Human Communication*.
- McQuail, Denis. (2000). *Mass Communication Theory*, 4th Edition. London: Sage Publication.
- McQuail, Denis. (2000). *Teori Komunikasi Massa (Mass Communication Theory)*, Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Musfialdy, M. (2019). *Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas dan Netralitas Pemberitaan Media*.
- Novrian Panji Sawung Jiwarka dan Subagyo. 2013. *KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA (Studi Kualitatif Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media Indonesia Periode 22 – 31 Januari 2013)*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Pedoman media siber. 2013
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. <https://kota-manado.kpu.go.id>.
- Radjak, I. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Netralitas Pers Pada Media Penyiaran di Indonesia Sejarah Media Online. <https://www.kompasiana.com>
- Total media massa di Indonesia 2018. <https://mediaindonesia.com>
- Shoemaker Pamela J, Stephen D. Reese. 1996. *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. Longman Trade/Caroline House.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta